

Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Retno Herningrum Pratiwi*¹ dan Martien Herna Susanti²

^{1,2}Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Article History

Disubmit 7 Januari 2020

Diterima 30 Juni 2020

Diterbitkan 2 Juli 2020

Kata Kunci

partisipasi politik;
pemilih pemula;
penyandang disabilitas

Abstrak

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu negara yang berlandaskan asas demokrasi. Indonesia merupakan negara yang demokratis, partisipasi politik dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Seperti yang telah dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN) DPC Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: bentuk Partisipasi politik yang dilakukan oleh anggota pemilih pemula Gerkatin Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 hanyalah sebatas Kampanye, Diskusi Politik, Komunikasi Politik, dan Pemberian Suara. Adapun dalam kegiatan partisipasi politik terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pemilih pemula penyandang disabilitas Tuna Rungu Gerkatin DPC Jakarta Selatan, yaitu adalah Kurangnya Sosialisasi, Tidak Ada Pendampingan, dan Sarana yang Kurang Ramah Disabilitas.

Abstract

Political participation is one of the important aspects in a country based on democratic principles. Indonesia is a democratic country, political participation can take many forms. As what had been done by novice voters with disabilities, the Movement for the Indonesian Deaf Welfare Organization (GERKATIN) South Jakarta DPC in the DKI Jakarta Governor Election in 2017. This study used a qualitative research method with data collection techniques including interviews and documentation. The results of the research in the field show that: the form of political participation by novice voters Gerkatin South Jakarta in the 2017 DKI Jakarta Governor Election is only limited to Campaign, Political Discussion, Political Communication, and Voting. As for political participation activities, there are a number of obstacles experienced by novice voters with disabilities from the Deaf Gerkatin DPC of South Jakarta, namely: Lack of Socialization, No Mentoring, and Facilities that are Less Disabled Friendly.

© 2020 Published by UNNES. This is an open access

PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah salah satu aspek yang dapat dikatakan penting dalam suatu negara yang berlandaskan asas demokrasi. Partisipasi dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan arah politik suatu daerah ataupun negara. Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki suatu peranan dalam memberikan arah politik pada suatu daerah. Bagi seluruh masyarakat yang telah berusia 17 tahun keatas dan/atau telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih juga mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum (pemilu).

Pada pelaksanaan pemilihan umum baik ketika

berlangsungnya pemilihan maupun pada saat kegiatan kampanye mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat termasuk juga partisipasi dari para penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak sama dengan masyarakat lainnya. Dalam kegiatan kampanye partisipasi penyandang disabilitas masih sangat minim. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat disabilitas diartikan sebagai mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu yang lama.

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Sejauh ini, mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai den-

* E-mail: retnohpratiwi@gmail.com

Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

gan kondisi mereka (Daulay, 2013:1).

Kenyataannya di lapangan, masih adanya pengabaian hak politik yang dirasakan oleh penyandang disabilitas khususnya pemilih pemula tuna rungu dalam Pemilu, antara lain (Muladi, 2009:261) hak untuk didaftarkan memberikan suara, hak atas akses ke TPS, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi termasuk informasi tentang pemilu, hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.

Berdasarkan berita mengenai kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam (nasional.tempo.co, 2018) permasalahan yang dialami oleh penyandang tuna rungu adalah tidak dapat memilih karena tidak mendengar namanya saat dipanggil dan kemudian terlewat. Masalah ini harus diperhatikan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pemilu untuk penyandang disabilitas. Kesulitan lain yang dihadapi para pemilih disabilitas adalah lokasi TPS yang terkadang sulit dijangkau mengakibatkan pemilih yang menggunakan kursi roda mengalami kesulitan mengaksesnya, seperti terletak di bibir kali, jalan sempit dan tidak rata. Persoalan lainnya adalah empati petugas TPS. Dalam hal ini dibutuhkan petugas TPS yang sabar dalam membimbing pemilih disabilitas. Karena pemilih disabilitas membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan pemilih lainnya.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Vash (1981: 22) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan disabilitas adalah terdapat kekurangan secara fisiologis, anatomis maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap, dengan kata handicap, mengacu pada rintangan yang dialami individu saat dia berupaya melakukan tugas sehari-hari, yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut.

Fungsi dan tujuan dari Pilkada menurut Janedri M. Gaffar (2012:85) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terbagi menjadi tiga poin utama, yaitu memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat, memilih berdasar visi, misi, program serta kualitas dan integritas pemimpin, dan pemilihan menjadi sarana pertanggungjawaban dan sarana untuk mengevaluasi dan mengontrol kepala daerah serta kekuatan politik yang menopangnya.

Pilkada DKI Jakarta telah berlangsung sebanyak dua kali putaran. Putaran yang pertama melibatkan tiga pasang calon gubernur serta wakil Gubernur, tiga pasang calon Gubernur tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Berdasarkan laman resmi KPU Jakarta, pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta yang telah berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017, KPU DKI Jakarta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 7.294.619 pemilih. Pada pemilu putaran pertama, dari jumlah pemilih. Tercatat warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.794.759 suara. Pada putaran kedua, yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017, KPU DKI Jakarta menetapkan DPT sebanyak 7.335.473 pemilih. Tercatat warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.744.120 suara.

Pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, banyak harapan bahwa pilkada secara langsung ini dapat menumbuhkan antusiasme politik rakyat yang diwujudkan

dengan tingginya partisipasi politik dari seluruh lapisan masyarakat DKI Jakarta tanpa adanya rasa memandang status sosial mereka. Berdasarkan data yang ada di halaman resmi KPU, hampir semua wilayah DKI Jakarta masih terdapat warga yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon dan wakil Gubernur DKI Jakarta. Fenomena bahwa masih terdapat warga yang tidak menggunakan haknya untuk memilih atau fenomena lahirnya sikap yang apatis masyarakat dengan membesarnya pilihan untuk tidak partisipasi atau golongan putih. Golongan putih (Golput) adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam memberikan suara dalam pemilihan (Prihatmoko, 2003: 152).

Pada saat pilkada tahun 2012, KPU Provinsi DKI Jakarta mendapatkan catatan negatif, baik dari pemilih disabilitas ataupun dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya peran dari KPU Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan hak berpolitik bagi penyandang disabilitas pada saat pilkada. Seperti yang ditegaskan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada saat itu, Mochammad Afifuddin (kompas.com, 2013) menyatakan bahwa Indonesia masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012, fasilitas bagi penyandang disabilitas belum maksimal.

DKI Jakarta sendiri telah berdiri sebuah organisasi khusus penyandang disabilitas tuna rungu yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan kemudahan akses dan kualitas layanan informasi publik terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Adapun organisasi tersebut adalah Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN) yang bertujuan untuk memperjuangkan wujudnya masyarakat inklusif dimana orang tuna rungu dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan haknya di masyarakat.

Menurut pengertian organisasi dari Kochler dalam Arni Muhammad (2004:23) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan identifikasi serta latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis akan mengangkat judul tentang "*Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan Pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*".

Mengawali tinjauan pustaka teoritis mengenai partisipasi politik menjadi pilihan pertama, Menurut pendapat dari McClosky (Budiarjo 2008:367), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Adapun pendapat lain dari Surbakti (2010:180), Partisipasi politik adalah salah satu bentuk keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut serta menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Menurut pendapat dari Nie dan Verba (Efriza, 2017:273) partisipasi politik adalah suatu aktivitas masyarakat yang legal, dan bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat-pejabat negara atau langkah-langkah yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, yang dapat mempengaruhi alokasi nilai serta otoritatif untuk masyarakat.

Sedangkan menurut Hardwick (Budiyanto 2007:20) partisipasi politik adalah memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu melanjutkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Pendapat lain mengenai partisipasi politik juga dikemukakan oleh Lane (Sastroatmodjo, 1995: 84) Fungsi dari partisipasi politik ada 4 (empat), yaitu yang pertama adalah sebagai sarana untuk mengejar motif ekonomi, kedua adalah sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan sosial, ketiga adalah sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, dan yang keempat adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu.

Terdapat beberapa faktor pendorong yang membuat individu tertarik untuk partisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Salah satunya, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya datang dari dalam diri individu itu sendiri dan dari orang terdekat di sekitarnya yang bukan mengetahui tentang kehidupan individu tersebut atau suatu kelompok tertentu, sedangkan faktor eksternal biasanya datang dari suatu kelompok kepentingan ataupun dari tim sukses dari calon kandidat yang menjadi peserta di dalam kegiatan pemilihan umum ataupun ketika pemilihan kepala daerah.

Selain kedua faktor diatas, faktor lain yang menjadi timbul partisipasi warga negara dalam berpolitik menurut Milbarth dalam Maran (2007:156), terdapat empat faktor utama untuk mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi politik, yaitu adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial seseorang, dan situasi atau lingkungan politik itu sendiri.

Berdasarkan pendapat dari Rosenberg dalam Maran (2007:156), ada tiga alasan mengapa suatu individu tidak ingin berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, yaitu adanya ketakutan akan konsekuensi negative dari aktifitas politik, adanya anggapan partisipasi politik merupakan hal yang sia-sia, dan tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik.

Menurut pendapat dari Roth dan Wilson (dalam Suryadi, 2007: 137), menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitas kegiatannya menjadi aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis.

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka yang baru memasuki usia memilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak

pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. (Fenyapwain, 2013: 6).

Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017.

Manfaat teoritis bagi peneliti dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan menjadi bahan referensi dalam Ilmu Politik khususnya dalam kajian partisipasi politik masyarakat terutama terkait penyandang disabilitas tuna rungu dalam menggunakan haknya pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Manfaat praktis bagi akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemilihan umum kepada penyandang disabilitas khususnya tuna rungu agar dapat turut serta membantu menyosialisasikan partisipasi dalam berpolitik.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Definisi dari metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007: 4) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam mengenai data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah 1) Bentuk partisipasi pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan yang turut berpartisipasi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, 2) Faktor penghambat pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan yang turut berpartisipasi pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota Gerkatina Jakarta Selatan dalam Pilkada DKI Jakarta putaran satu dan dua tahun 2017, mereka memiliki pemikiran yang lebih terbuka dalam menentukan pilihannya pada saat Pemilihan berlangsung. Mereka memilih pasangan calon Gubernur dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh McClosky (Budiarjo 2008:367), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut pendapat Roth dan Wilson (dalam Suryadi, 2007: 137), menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitas kegiatannya menjadi aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Apabila di jenjangkan, intensitas kegiatan partisipasi politik warganegara tersebut akan membentuk segitiga yang menyerupai piramida yang

kemudian dikenal dengan istilah “piramida partisipasi politik”. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 hanya sebatas mengikuti diskusi politik dan menggunakan hak pilihnya, pada partisipasi politik mengacu pada piramida partisipasi politik, mereka berada ditingkat pengamat.

Pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan memiliki harapan agar dengan mereka tidak melakukan golput, mereka turut membantu dalam kemajuan DKI Jakarta melalui program kegiatan serta kebijakan yang nantinya diterapkan pada calon Gubernur dan wakil yang telah mereka pilih ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Surbakti (2010:180), Partisipasi politik adalah salah satu bentuk keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut serta menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Tujuan pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada adalah ingin memilih sesuai dengan apa yang menurut mereka nantinya dapat membawa perubahan Jakarta menuju yang lebih baik dari sebelumnya, serta bisa memperhatikan dan mengutamakan kesetaraan hak-hak disabilitas, baik disabilitas tuna rungu, tuna netra dan tuna grahita. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Janedri M. Gaffar (2012:85) pada poin pertama dan poin kedua yaitu, memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan masyarakat, sehingga kepala daerah yang terpilih nantinya diharapkan dapat memenuhi dan mewujudkan keinginan masyarakat daerah tersebut, dan melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini diharapkan masyarakat daerah memilih pemimpin dengan berdasarkan visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah.

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada unsur paksaan atau mereka melakukan dengan sukarela dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon ketika Pilkada berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, telah sesuai dengan asas Bebas yang dikemukakan oleh Prihatmoko (2005:110-111) setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan apa kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Diskusi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas khususnya tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan hanya sebatas membahas secara umum dan membahas tentang hak-hak disabilitas yang dirasa masih kurang dan perlu dibenahi dengan teman satu komunitas tuna rungu ataupun dengan teman sebayanya, dalam hal ini partisipasi politik yang dilakukan dalam bentuk diskusi politik tidak hanya perseorangan atau individu saja. Sesuai dengan pendapat dari Huntington dan Nel-

son (1994:21), mengkategorikan usul-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan berpartisipasi politik terdiri dari kelas, kelompok, lingkungan, partai, dan golongan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa mereka melakukan diskusi politik mengenai Pilkada DKI Jakarta berdasarkan Kelas sosial mereka, yaitu organisasi Gerkatina yang beranggotakan khusus disabilitas tuna rungu.

Peran dari Organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan terhadap pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu adalah sebagai sarana untuk memberikan segala informasi terbaru dan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli khususnya mengenai Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Tujuan dari organisasi tersebut adalah diharapkan bahwa nantinya pada saat pemilihan berlangsung mereka dapat menekan angka golput ketika pilkada DKI Jakarta tahun 2017, terutama kepada anggota pemilih pemula. Peran lain dari Organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan antara lain adalah mereka mendukung penuh atas hak masyarakat terutama penyandang disabilitas tuna rungu untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang bebas dan adil. Hal-hal tersebut sesuai dengan menurut pengertian organisasi dari Kochler dalam Arni Muhammad (2009:23) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini tujuan yang dimaksudkan adalah pendidikan politik mengenai Pilkada DKI Jakarta 2017.

Adapun beberapa hal yang menjadi beberapa faktor penghambat bagi mereka. Mengingat bahwa mereka mengalami kekurangan secara fisik, namun mereka memiliki keinginan untuk mempunyai kesetaraan hak yang sama dengan masyarakat lain. Adapun pengertian disabilitas menurut Vash (1981: 22) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan disabilitas adalah terdapat kekurangan secara fisiologis, anatomis maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap, dengan kata handicap, mengacu pada rintangan yang dialami individu saat dia berupaya melakukan tugas sehari-hari, yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut.

Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta putaran satu dan dua yang pertama adalah ketika saat pemilihan berlangsung, tidak adanya pendampingan baik dari pihak keluarga atau petugas dan kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut seperti salah satu dari empat faktor yang dikemukakan Maran (2007:156) Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik. Berdasarkan status mereka yang memiliki kekurangan secara fisik, mereka merasa bahwa perlu adanya perhatian dari orang disekitar, terutama keluarga dalam membimbing pendidikan politik. Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyand-

dang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta yang kedua, permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas rungu adalah ketika pemilihan berlangsung adalah tidak mendengar ketika pemanggilan nama serta tidak adanya keterangan jenis kecacatan di dalam surat undangan dari pihak KPU. Mengingat bahwa secara tampak fisik mereka tidak mencirikan bahwa memiliki kekurangan atau mengalami disabilitas rungu. Mereka tidak mendapatkan fasilitas yang dapat dikatakan memadai saat di lokasi pemilihan seperti pemanggilan menggunakan layar proyektor untuk memudahkan disabilitas tuna rungu. Dikarenakan adanya kurangnya aksesibilitas yang kurang ramah pemilih penyandang disabilitas terutama tuna rungu atau tuli, sehingga tidak dapat memilih secara langsung. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu asas pilkada yang diutarakan oleh Prihatmoko (2005:110-111), Langsung. Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

Selanjutnya, faktor penghambat ketiga adalah minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai tata cara pemilihan yang diperuntukkan penyandang disabilitas tuna rungu, serta kurangnya informasi yang tersedia dalam bentuk teks atau tulisan agar membantu untuk memudahkan penyandang disabilitas tuna rungu memahami kondisi politik dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut, pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 lalu dapat dikatakan tidak sesuai dengan salah satu asas LUBERJUDIL, yakni asas Adil. Berdasarkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prihatmoko (2005:110-111) Adil, dalam penyelenggara Pilkada setiap pemilih dan calon/peserta Pilkada mendapatkan perlakuan yang sama serta terbebas dari kecenderungan pihak manapun. Kenyataannya di lapangan, dalam pelaksanaan Pilkada pada Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 putaran satu dan dua beberapa waktu lalu, para penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan, terutama pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilihan tidak merasa adanya keadilan ketika mereka menggunakan hak suaranya. Ketidakadilan yang mereka rasakan adalah dalam bentuk tidak adanya pendampingan dari pihak keluarga ketika pemilihan berlangsung karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara serta pemahaman calon Gubernur dalam Pilkada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, kesimpulannya sebagai berikut. 1) Bentuk Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 baik putaran satu dan dua, mereka tergolong dalam kelompok pengamat. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya intensitas yang turut bergabung ke dalam tim sukses para calon Gubernur DKI Jakarta, minimnya partisipasi politik dalam mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon Gubernur DKI Ja-

karta, walaupun beberapa ada yang turut mengikuti, tetapi sebagian dari mereka cenderung tidak ikut kampanye, kemudian yang terakhir adalah pemilih pemula penyandang disabilitas cenderung lebih memilih untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan secara sukarela. Peran dari Organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan terhadap pemilih pemula penyandang disabilitas adalah sebagai sarana untuk memberikan segala informasi terbaru dalam hal informasi kampanye, hak-hak penyandang disabilitas khususnya tuna rungu atau tuli, dan pendidikan politik lainnya agar menekan angka golput dikalangan pemilih pemula pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. 2) Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pada putaran satu dan dua adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPU DKI Jakarta menjelang pilkada berlangsung, tidak adanya pendampingan dari pihak keluarga atau TPS, dan kurangnya perhatian petugas TPS terhadap penyandang disabilitas tuna rungu.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daulay, Zainul. 2013. *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat.
- Fenyapwain, M. M. (2013). Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilihan Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan Kakas. *Jurnal Acta Diurna*, 2(1).
- Gaffar, M. Janedjri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta. Kompas.
- <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/30/2245368/Hak.Politik.Penyandang.Disabilitas.yang.Dibungkam>. (21 Februari 2019)
- <https://nasional.tempo.co/read/1077843/ppua-penca-pemilu-masih-belum-adil-bagi-penyandang-disabilitas/full&view=ok> (21 Februari 2019)
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosisologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Arni. 2004. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga.
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I.
- Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Vash, C. L. (1981). *The Psychology of Disability*. New York: Springer Publishing Company Tarmansyah, 2007, *Inklusif Pendidikan Untuk Semua*, Jakarta: Depdiknas.